DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021
EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

Analisis Faktor Penyebab Kemiskinan dan Bagaimana Penanggulangannya : Studi Empiris Pada 29 Kabupaten di Jawa Tengah 2014-2020

Dicki Dwi Ferian[1*], Edy Yusuf Agung Gunanto[2]
[1,2]Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia
Jl. H. Prof. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang 50275
*e-mail : dickidwiferian@yahoo.com

Artikel Info

Received :
20 September 2021
Revised :
17 October 2021
Accepted :
19 November 2021

Kata Kunci :
Kemiskinan, Data Panel, Fixed Effect Model, Pooled EGLS

Keywords :
Poverty, Panel Data, Fixed Effect Model, Pooled EGLS

ABSTRAK

Kesejahteraan masyarakat menjadi indikator dari keberhasilan pembangunan. Dan dalam pelaksanannya pembangunan akan dihadapkan pada berbagai masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Salah satu permasalahan kompleks dan kronis terkait dengan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan akan mendorong lahirnya masalah-masalah sosial lain yang bersifat negatif. Sulit mencari apa penyebab pasti dan bagaimana solusi yang benar-benar efektif dalam menanggulangi kemiskinan ini. Terkait dengan hal itu, permasalahan kemiskinan di Jawa Tengah berkaitan dengan penurunannya yang berjalan sangat lambat serta masih tingginya tingkat kemiskinan di Jawa Tengah yang selalu berada di atas level nasional. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah melihat bagaimana faktor penyebab kemiskinan dan penanggulangannya mengacu pada berbagai teori dan penelitian terdahulu yang terkait. Variabel pengangguran, dependency ratio, dan produktivitas dianalisis sebagai faktor penyebab kemiskinan. Sedangkan agrishare, industrishare, dan dana desa dianalisis sebagai faktor yang dianggap mampu menanggulangi kemiskinan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan data panel dan diestimasi dengan pendekatan fixed effect model with pooled generalised least square estimate with cross section weight. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel agrishare, industrishare, produktivitas tenaga kerja, dan dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel pengangguran dan dependency ratio tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

Analysis of the Causes of Poverty and How to Overcome it: Empirical Study in 29 Districtsin Central Java 2014-2020

ABSTRACT

Community welfare is an indicator of the success of development. And in it's implementation, economic development will be faced with various problems related to the welfare of society. One of the complex and chronic problems related to the welfare of the

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

community is poverty. The high of poverty rate will have an impact on the emergence of other negative social problems. It is difficult to find out what the exact cause is and how the solution is really effective in reducing the poverty. In this regard, the problem of poverty in Central Java is related to it's slow pace of poverty reduction and the high level of poverty in Central Java which is always above the national level. The aim of this research is to see how the factors that cause poverty and how to eradicate it based on theories and related previous research. Unemployment, dependency ratio, and productivity variables were analyzed as factors causing poverty. while agrishare, industrialshare, and village funds were analyzed as factors that were considered capable of eradicating poverty. The analytical tool used is multiple linear regression with panel data and estimated using the fixed effect model approach with pooled generalized least square estimate with cross section weight. The results showed that the variables of agrishare, industrialshare, labor productivity, and village funds had a significant effect on poverty. While the unemployment variable and dependency ratio do not have a significant effect on poverty.

PENDAHULUAN

Indonesia sejak awal kemerdekaan telah memberikan perhatian yang lebih untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat. Namun hingga sekarang kesejahteraan masyarakat tersebut seolah telah menjadi sesuatu yang sulit untuk dicapai, salah satu permasalahan terbesar terkait kesejahteraan tersebut adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan dari dulu memang telah menjadi problema besar bagi Indonesia. Menurut para ahli, dimensi kemiskinan itu sangatlah kompleks. Dimensi-dimensi tersebut dapat dilihat dari berbagai indikator seperti rendahnya aksesibilitas kesehatan dan air bersih, padatnya kawasan pemukiman kumuh, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat (Sukirno, 2014). Konsekuensi negatif dari adanya masalah kemiskinan tersebut akan mendorong lahirnya masalah sosial baru seperti masalah kriminalitas, masalah kesehatan dan pendidikan, serta konflik sosial bernuansa SARA yang timbul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang semakin akut.

Terkait penanggulangan kemiskinan ini, pemerintah selalu berupaya untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan baik di tingkat nasional maupun daerah. Upaya tersebut tergolong sulit dan menghabiskan banyak dana karena fokus pemerintah memang lebih ke aspek ekonomi yang membutuhkan anggaran besar, sedangkan hasil yang dicapai pun tidak memberikan penurunan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan di Indonesia cenderung lambat dan hanya menurunkan persentase kemiskinan kurang dari 0,5 persen setiap tahunnya. Dalam hal ini Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia juga mengalami permasalahan kemiskinan yang sama.

Gambar 1 menunjukkan perbandingan pola kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dan Indonesia selama tujuh tahun terakhir.

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

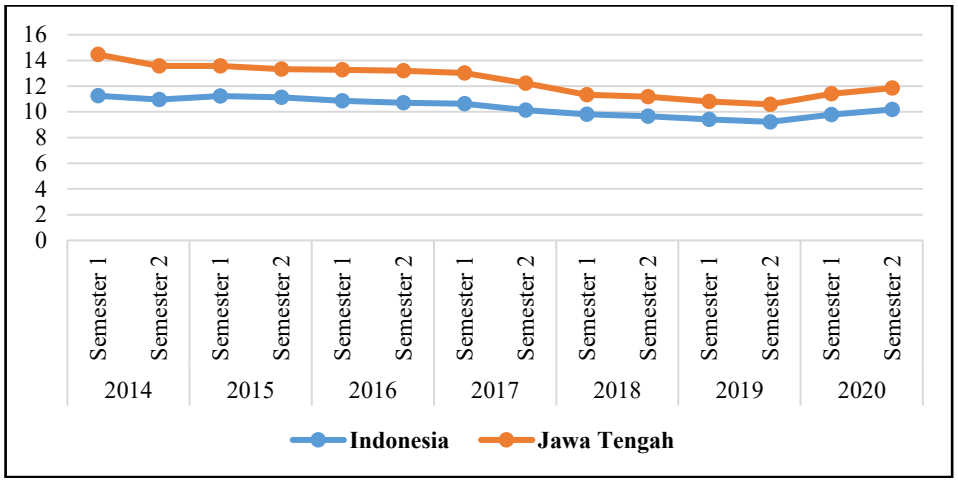

Sumber: BPS Jawa Tengah. Beberapa Terbitan. Diolah (2021)

Gambar 1. Tingkat Kemiskinan di Indonesia dan Jawa Tengah Tahun 2014-2020

Dari gambar 1 tersebut dapat diidentifikasi bahwa memang penurunan kemiskinan di Jawa Tengah berjalan sangat lambat, serta permasalahan lain yaitu masih tingginya tingkat kemiskinan yang melebihi sasaran *MDGs* dan RPJM. Dari gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa Jawa Tengah merupakan provinsi yang tingkat kemiskinannya (*Head Count Index*/HCI) selau berada di atas level nasional. Dan di tahun 2020 sebagai dampak dari adanya pandemi, Jawa Tengah termasuk dalam 5 provinsi dengan jumlah dan persentase penduduk miskin terbanyak di Indonesia.

Banyak faktor penyebab kemiskinan, baik yang disebabkan oleh individu, keluarga, maupun kondisi sosial ekonomi dalam lingkunganya. Salah satu faktor kemiskinan yang perlu dikaji terkait kemiskinan yang berasal dari individu adalah pengangguran. Ketika pertumbuhan ekonomi di suatu negara tinggi namun penganggurannya juga tinggi maka angka kemiskinan akan tetap meningkat (Maku, 2019). Putra & Arka (2016) juga menyebutkan bahwa meningkatnya pengangguran maka akan semakin tidak produktif penduduknya sehingga penduduk tersebut akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan hidup yang semakin tidak terpenuhi akan meningkatkan tingkat kemiskian yang ada. Dilihat berdasarkan data, dalam 7 tahun terakhir pengangguran di Jawa Tengah tergolong tinggi. Dibandingkan dengan provinsi lain di pulau jawa, pengangguran di Jawa Tengah menempati urutan kedua terbesar dengan rata-rata sebesar 5,04 persen. Tingkat pengangguran terbuka paling tinggi berada di Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata sebesar 8,72 persen. Kemudian di tempat ketiga dan keempat diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dan DIY dengan rata-rata sebesar 4,38 persen dan 3,46 persen. Tingginya angka pengangguran tersebut sejalan dengan tingginya angka kemiskinan.

Masalah rasio ketergantungan *(dependency ratio)* juga menjadi perhatian. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan rasio ketergantungan yang tinggi merupakan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan tren kemiskinan karena sebagian dari pendapatan anggota keluarga yang produktif harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum produktif dan tidak produktif (Sinnathurai, 2013). Berdasarkan data BPS, rasio ketergantungan di Jawa Tengah tergolong rendah yang berkisar di angka 40-48 persen dibandingkan nilai rasio ketergantungan tingkat nasional yang berkisar di angka 50-55 persen. Namun rendahnya angka ketergantungan di Jawa Tengah tersebut tidak sejalan dengan rendahnya kemiskinan di Jawa Tengah.

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

Terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, sektor pertanian adalah sektor strategis yang dapat dijadikan sebagai pusat sektor untuk penanggulangan kemiskinan karena sektor ini merupakan sektor yang paling dekat dengan kemiskinan. Siregar & Wahyuni (2007) menyatakan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara berada di wilayah pedesaan dan sangat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Namun meskipun kompleksnya permasalahan kemiskinan di sektor pertanian tersebut, di Indonesia sendiri sektor pertanian ini merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Peran tersebut dapat digambarkan melalui penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Dalam kaitannya dengan kemiskinan sendiri, beberapa penelitian terkait telah dilakukan. Tumbuhnya sektor pertanian akan berdampak pada turunnya angka kemiskinan di pedesaan (Ivanic & Martin, 2018). Di Jawa Tengah sendiri, dalam 7 tahun terakhir sektor penyumbang terbesar dari PDRB adalah sektor industri yang memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 30-35 persen sedangkan sektor pertanian menjadi sektor kedua di Jawa Tengah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sebesar 14-15 persen. Meskipun sektor pertanian bukan menjadi sektor terbesar penyumbang PDRB di Jawa Tengah, *agrishare* (kontribusi sektor pertanian dalam PDRB) di jawa tengah masih tergolong tinggi. Dan yang menjadi perhatian disini adalah bahwa tingginya angka *agrishare* di Jawa Tengah ini seakan tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap penurunan kemiskinan di sektor pertanian.

Dalam hal ini sektor lain yang dianggap lebih efektif menekan tingkat kemiskinan adalah sektor industri (Zheng et al., 2016). Sektor industri dianggap berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja sehingga pemerintah saat ini sedang giat-giatnya menggencarkan program industrialisasi. Dan bukan tidak mungkin jika suatu saat nanti sektor pertanian akan tergeserkan dengan sektor industri. Pemerintah seharusnya dapat mengoptimalkan kedua sektor tersebut dan tidak memberatkan kepada sektor sebelah karena sebagian penduduk miskin di Indonesia adalah penduduk yang bekerja di sektor pertanian.

Salah satu faktor kemiskinan lainnya yang perlu dikaji yaitu produktivitas tenaga kerja. Dalam banyak kasus, tidak sedikit penduduk yang memiliki pendapatan tetap, namun mereka tetap termasuk dalam kategori miskin disebabkan pendapatan mereka rendah yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas kerja mereka. Produktivitas yang rendah tersebut berasal dari ketidakmampuan pekerja dalam bekerja secara maksimal. Kebijakan pengentasan kemiskinan yang cepat melalui dampak positif dari investasi sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Adediyan & Omorenuwa, 2021). Maka dari itu faktor produktivitas tenaga kerja juga sangat relevan dalam mempengaruhi kemiskinan selain dilihat dari faktor pendapatan. Dan dilihat berdasarkan data, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah tenaga kerja tebesar ketiga di Indonesia. Namun produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah tergolong rendah, bahkan jauh lebih rendah dibandingkan produktivitas tenaga kerja tingkat nasional. Permasalahan tersebut sejalan dengan tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah.

Salah satu solusi kebijakan yang ditawarkan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan adalah pengalokasian dana desa, yaitu transfer berupa bantuan sosial tunai dari pemerintah pusat yang digunakan untuk biaya modal pembangunan desa. Dasar penetapan kebijakan ini adalah karena desa sampai dengan sekarang tetap menjadi kantong kemiskinan, maka sangat wajar jika pembangunan desa menjadi prioritas utama di Indonesia. Menurut Arham & Hatu (2020), dana desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Semakin besar anggaran dana desa yang diberikan, desa akan dapat memenuhi kebutuhan dan keperluannya yang berkaitan dengan pembangunan sehingga kemiskinan dapat ditekan.

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021
EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

Salah satu provinsi yang mendapat dana desa adalah Jawa Tengah. Pada tahun 2019 dan 2020 Jawa Tengah memperoleh dana desa sebesar 7,8 Triliun dan 8,2 Triliun. Namun, dibalik besarnya nominal dana desa tersebut masih terselip sebuah keraguan terhadap keefektifan dana desa tersebut. Keraguan tersebut dilandasi atas dasar kemiskinan yang ada di Indonesia dan Jawa Tengah yang belum menunjukkan penurunan yang signifikan meskipun telah diberlakukan kebijakan dana desa ini. Laju penurunannya berjalan lambat dan cenderung konstan. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa angka kemiskinan di pedesaan jauh lebih besar dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan.

Berdasarkan data-data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan terus menjadi masalah besar yang tidak mudah untuk di atasi, hal tersebut juga berlaku di Jawa Tengah. Kemiskinan masih saja menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi di Jawa Tengah. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka, *dependency ratio, agrishare, industrishare*, produktivitas tenaga kerja, dan dana desa terhadap kemiskinan 29 kabupaten di Jawa Tengah.

KAJIAN TEORI

Kemiskinan

Mubyarto (2004) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah kondisi yang menggambarkan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Masalah kemiskinan dalam hal ini merupakan persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah, dan upaya penanggulangan kemiskinan adalah salah satu aspek penting dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Banyak sekali teori yang menjelaskan faktor penyebab kemiskinan. Hartomo dan Aziz dalam Annur (2013) menyebut beberapa faktor penyebab kemiskinan yaitu: rendahnya pendidikan, perilaku malas bekerja, SDA yang terbatas, pengangguran, rendahnya kepemilikan modal, dan tingginya beban tanggungan anggota keluarga yang tidak produktif dalam sebuah keluarga. Selain itu, ada salah satu teori yang cukup terkenal yang dikemukakan oleh Nurkse tentang *vicious cycle of poverty* atau teori lingkaran kemiskinan. Nurkse menjelaskan bahwa kemiskinan dapat terjadi akibat rendahnya pendapatan yang disebabkan akibat rendahnya produktivitas tenaga kerja, hal tersebut membuat rendahnya kemampuan masyarakat untuk menabung dan berinvestasi, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pembentukan modal. kesemua faktor tersebut akan berputar secara terus menerus dan tidak ada ujungnya (Arsyad, 2016)

Sedangkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, beberapa teori membahas mengenai hal ini. Menurut Kurniawan (2009), dalam menekan angka kemiskinan dibutuhkan pembangunan yang berfokus pada pembangunan sektor pertanian. Dengan memperhatikan pembangunan ekonomi pedesaan, maka pembangunan tersebut akan berdampak pada tumbuhnya sektor lain di luar pertanian. Pembangunan berasaskan agroindustri dapat diterapkan, dalam hal ini penanggulangan kemiskinan harus menyasar pada pertumbuhan output sektor pertanian sehingga akan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat desa sekaligus dapat meningkatkan produktivitas dalam proses pengolahan komoditas primer yang dilakukan industri manufaktur.

Kemudian teori lain yang menjelaskan tentang penanggulangan kemiskinan adalah teori Rostow dan Musgrave dalam Idris (2016). Teori ini menjelaskan tentang tahapan pengeluaran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sesuai dengan perkembangannya yang dibagi menjadi beberapa tahap. Pada tahap pertama investasi pemerintah dibutuhkan dalam jumlah yang besar karena di tahap ini fokus pemerintah adalah untuk pemenuhan kebutuhan prasarana untuk pendidikan dan sekolah, kesehatan, transportasi, dan sebagainya.

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

Selanjutnya pada tahap menengah peranan investasi mulai meluas hingga investasi swasta mulai masuk namun peranan investasi pemerintah masih dibutuhkan. Fokus pemerintah pada tahap ini adalah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pada tahap akhir peranan pemerintah ini beralih ke pengeluaran dalam hal penunjang kegiatan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan. Pada tahap ini juga peranan pemerintah mulai menyasar ke daerah-daerah melalui pemberian bantuan tunai dan program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Sehingga dapat disimpulkan menurut teori rostow dan musgrave, agar pengentasan kemiskinan ini berjalan lebih efektif peran pemerintah dalam bentuk pengeluaran pemerintah dan investasi ini sangat penting.

Pengangguran

Menurut Sukirno (2014) pengangguran adalah sebuah kondisi ketika seseorang sudah masuk dalam angkatan kerja dan ingin segera bekerja akan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Dalam hal ini pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang berdampak pada kelangsungan hidup manusia secara langsung. Tulus H. Tambunan (2011) menjelaskan bahwa pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan melalui beberapa cara, antara lain: (i) ketika rumah tangga memiliki keterbatasan dalam likuiditasnya yang sangat menggantungkan tingkat konsumsinya dari seberapa besar pendapatannya saat ini, sehingga ketika rumah tangga tersebut dilanda masalah pengangguran maka secara langsung berdampak pada tingkat pendapatan dan konsumsinya; (ii) ketika rumah tangga memiliki keterbatasan dalam likuiditasnya namun tidak terlalu menggantungkan pendapatannya saat ini, sehingga ketika pengangguran meningkat akan berpengaruh pada kemiskinannya dalam jangka panjang namun tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek. Sedangkan Prasetyoningrum (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengangguran merupakan indikator penting terkait dengan pendapatan, ketika pendapatan berkurang akibat menganggur maka kemiskinan juga akan meningkat.

Dependency Ratio

Dependency ratio merupakan perbandingan jumlah penduduk usia non produktif dengan penduduk produktif dalam suatu negara atau wilayah. Angka dalam *dependency ratio* menunjukkan besaran beban yang ditanggung penduduk produktif terhadap penduduk non produktif. Dilihat dari teorinya, *dependency ratio* memiliki hubungan dengan kemiskinan. Teori yang dikemukakan Harord Domar yang menyatakan bahwa pendapatan nasional akan secara langsung dipengaruhi oleh tingkat tabungan dan tingkat investasi (Todaro, Michael P., 2006). Hal tersebut memberikan gambaran yang menunjukkan bahwa ketika semakin tinggi angka *dependency ratio* mengimplikasikan bahwa beban tanggungan yang ditanggung penduduk usia produktif akan semakin besar dan hal tersebut berdampak langsung pada rendahnya tingkat tabungan dan investasi karena pendapatan yang diperoleh akan lebih banyak digunakan untuk konsumsi daripada menabung yang menyebabkan penurunan dalam pembentukan modal dan angka kemiskinan akan meningkat. Hal sama diungkapkan oleh Solow yang mendukung teori tersebut. Menurut Solow jika suatu negara menyisihkan sebagian pendapatannya ke dalam tabungan dan investasi maka negara tersebut akan memiliki cadangan modal dan berada dalam kondisi yang mapan dan pendapatan tinggi (Mankiw, 2012).

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

Sektor Pertanian

BPS merilis kontribusi sektor pertanian dan industri pengolahan sebagai sektor yang paling berperan dalam perekonomian Indonesia. Selain berkontribusi dalam PDRB dan penyerapan tenaga kerja, sektor ini juga sektor yang paling bersinggungan dengan kemiskinan. Sehingga dengan memfokuskan pembangunan pada sektor ini akan berdampak pada turunnya kemiskinan. Dalam hal ini *agrishare* (kontribusi sektor pertanian dalam PDRB) memiliki hubungan dengan kemiskinan, Jhingan (2004) menyatakan bahwa sektor pertanian menjadi sektor primer yang berperan terhadap pendapatan utama negara dan sebagai penyedia kebutuhan pangan. Sehingga ketika sektor pertanian ini tumbuh dengan sangat pesat maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dan kemiskinan akan berkurang.

Sektor Industri

Menurut BPS, sektor industri adalah sektor yang bergerak dalam kegiatan mengubah barang mentah sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih bernilai jual dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Di Indonesia sendiri, sektor industri ini merupakan sektor utama dalam perekonomian Indonesia setelah sektor pertanian. Terkait dengan kemiskinan, Sakti (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *share* sektor industri dalam PDRB dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Sektor industri masih dipandang sebagai sektor yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif. Lebih lanjut dalam perkembangannya pembangunan berbasis agroindustri yang merupakan kombinasi antara sektor pertanian dan industri menjadi lebih efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Dorosh & Thurlow, 2018).

Produktivitas Tenaga Kerja

Menurut Gilarso (2007), produktivitas merujuk pada kualitas faktor produksi (tenaga kerja) dalam menghasilkan sesuatu. Dalam perhitungan ekonomi, produktivitas tenaga kerja merupakan hasil bagi antara nilai PDRB harga konstan dengan jumlah tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja ditentukan dari tingkat pendidikan, kesehatan, investasi pemerintah dan investasi swasta. Menurut Mankiw (2012), banyaknya barang atau jasa yang dapat dihasilkan oleh seorang pekerja akan meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Ketika produktivitasnya rendah maka hal tersebut merupakan salah satu sumber penyebab kemiskinan. Sedangkan Herman (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perubahan struktural dari sektor pertanian ke sektor industri perlu dilakukan dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkualitas. Dalam hal ini peningkatan produktivitas sangat dibutuhkan dalam persaingan kerja agar tenaga kerja dapat bertahan di dalamnya.

Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditujukan kepada desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan oleh desa untuk pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, sebagai penunjang pembangunan desa berupa pemenuhan hak-hak dasar penduduk, dan untuk pemberdayaan masyarakat. Tujuan dana desa tersebut pada intinya adalah sebagai wujud usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro, Michael P. (2006) kesejahteraan masyarakat merupakan output yang dihasilkan dari pembangunan masyarakat yang dilihat dari peningkatan kemampuan masyarakatnya dalam

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021
EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan kesejahteraan masyarakat yang rendah terpusat pada wilayah desa dan dana desa sebagai solusi yang strategis dalam pengentasan kemiskinan di tingkat desa.

Berdasarkan teori-teori tersebut, maka konsep yang ingin dibangun adalah bahwa kemiskinan ini memiliki beberapa faktor penyebab, antara lain pengangguran, *dependency ratio,* dan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan faktor yang dipertimbangkan mampu untuk menurunkan kemiskinan adalah kontribusi sektor pertanian dan industri dalam PDRB, serta dana desa sebagai instrumen kebijakan dari pemerintah.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian teori, penelitian terdahulu dan studi empiris yang berkaitan dengan penelitian di bidang ini, maka dibuatkan hipotesis sebagai berikut: (i) Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan; (ii) *Dependency ratio* berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan; (iii) *Agrishare* berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan; (iv) *Industrishare* berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan; (v) Produktivitas tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan; dan (vi) Dana desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

METODE

Data panel 29 kabupaten dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah digunakan dalam penelitian ini, 6 kota tidak diikutkan dikarenakan keterbatasan kelengkapan data. Secara rinci deskripsi variabel dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi Operasional Variabel

Variabel			Satuan	Sumber
Dependen	POV	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	BPS, "Data dan Informasi Kemiskinan di Jawa Tengah"
Independen	TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	BPS, "Profil Ketenagakerjaan Jawa Tengah"
	RK	*Dependency Ratio*	Persen	BPS, " Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah"
	AGR	*Agrishare* (*Share* pertanian dalam PDRB)	Persen	BPS, "PDRB Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha"
	IND	*Industrishare* (*Share* industri dalam PDRB)	Persen	BPS, "PDRB Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha"
	PROD	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah per Tenaga Kerja	BPS, "PDRB Lapangan Usaha dan Profil Ketenagakerjaan Jawa Tengah"
	DD	Dana Desa	Milliar Rupiah	DJPK Kemenkeu

Sumber: Penulis (2021)

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

Bentuk perumusan persamaan model dalam penelitian ini yaitu:

$$LnPOV_{it} = \beta 0 + \beta_1 TPT_{it} + \beta_2 RK_{it} + \beta_3 AGR_{it} + \beta_4 IND_{it} + \beta_5 PROD_{it} + \beta_6 DD_{it} + \varepsilon_{it}$$

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan data panel dan diolah dengan pendekatan *pooled generalised least square estimate with cross section weight* menggunakan program Eviews 10. Sebelum melakukan regresi, terlebih dahulu dilakukan uji spesifikasi model untuk memperoleh estimasi yang paling tepat digunakan, apakah *Common Effect Model* (CEM), *Random Effect Model* (REM), atau *Fixed Effect Model* (FEM). Pengujian spesifikasi model yang dilakukan meliputi uji chow dan uji hausman.

Uji Chow

Uji chow dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji *redundant fixed effect tests* untuk memilih model terbaik antara FEM atau CEM. Uji chow yang menghasilkan probabilitas *chi-square* > α (0,05) maka model yang digunakan adalah CEM. Sebaliknya, ketika probabilitas *chi-square* yang dihasilkan < α (0,05) maka model yang sebaiknya digunakan adalah FEM. Pada saat model yang terpilih adalah *fixed effect* maka diperlukan uji hausman.

Uji Hausman

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah pada model akan dianalisis menggunakan FEM atau REM. Uji hausman dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji *correlated random effects-hausman test*. Uji hausman yang menghasilkan nilai probabilitas < α (0,05) maka model yang digunakan adalah FEM. Sebaliknya ketika nilai probabilitas > α (0,05) maka model yang digunakan adalah REM.

Pengujian Asumsi Klasik

a. Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *jarque-bera*, dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai *chi squares* hitung < *chi squares* tabel atau probabilitas *jarque-bera* > α (0,05), maka data mempunyai distribusi normal. Sedangkan jika nilai *chi squares* hitung > *chi squares* tabel atau probabilitas *jarque-bera* < α (0,05), maka data tidak terdistribusi secara normal.

b. Multikolinieritas

Multikolineritas menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas dari variabel independennya. Menurut Gujarati (2013), model yang mengalami masalah multikolinearitas, maka besarnya koefisien korelasi antar variabel independennya adalah lebih dari 0,8. Sebaliknya, ketika koefisien korelasi antar variabel independen kurang dari 0,8 maka model bebas dari multikolinearitas.

c. Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini metode untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas adalah dengan uji park. uji park dapat dilakukan dengan cara meregresikan nilai residual dengan masing-masing variabel independen (Ghozali, 2013). Dasar pengambilan keputusannya adalah Jika nilai probabilitas > α (0,05) maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitas < α (0,05) maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas.

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

d. Autokorelasi

Metode untuk mendeteksi gejala autokorelasi dalam penelitian ini, adalah dengan menggunakan uji *breusch-godfrey*, jika nilai probabilitas < α (0,05) maka terjadi gejala autokorelasi. Sedangkan Jika nilai probabilitas > α (0,05) maka tidak terjadi gejala autokorelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menentukan model terbaik dalam penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan estimasi dengan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Tabel 2 menyajikan ringkasan ketiga model tersebut.

Tabel 2. Ringkasan Estimasi Model Regresi Data Panel

Dependent Variable: Ln Pov				
Jenis Estimasi	***Variable***	***Coefficient***	***Prob.***	**Keterangan**
Common Effect Model (CEM) with Pooled Least Squares	TPT	0,071054	0,0000	*R-Squared*: 0,441360
	RK	0,077116	0,0000	*Adjusted R-Squared*: 0,427182
	AGR	0,020624	0,0000	
	IND	0,005194	0,0451	
	PROD	0,003023	0,2440	
	DD	0,000242	0,2667	
Fixed Effect Model (FEM) with Pooled EGLS (Cross-section Weights)	C	4,448964	0,0000	*R-Squared*: 0,992355
	TPT	-0,003533	0,2359	*Adjusted R-Squared*: 0,990808
	RK	-0,015198	0,3060	
	AGR	0,039000	0,0000	*F-Statistic*: 641,4025
	IND	0,019850	0,0000	*Prob. (F-Statistic)*: 0,000000
	PROD	-0,005975	0,0000	
	DD	-0,000140	0,0247	
Random Effect Model (REM) with Pooled EGLS (Cross-section Weights)	C	2,382480	0,0007	*R-Squared*: 0,595059
	TPT	-0,001599	0,7031	*Adjusted R-Squared*: 0,582663
	RK	0,035225	0,0074	
	AGR	0,032607	0,0000	*F-Statistic*: 48,00350
	IND	0,010697	0,0040	*Prob. (F-Statistic)*: 0,000000
	PROD	-0,005849	0,0006	
	DD	-0,0000871	0,2587	

Sumber: Olah Data Eviews 10 (2021)

Selanjutnya Tabel 3 menunjukkan pengujian spesifikasi model dengan uji chow dan uji hausman untuk menghasilkan model estimasi terbaik.

Tabel 3. Hasil Uji Chow dan Uji Hausman

	Effect Tests	*Statistics*	*d.f*	*Prob.*
Uji Chow (CEM vs FEM)	*Cross-Section F*	239,287366	(28,168)	0,0000
	Test Summary	*Chi-Sq. Stat.*	*Chi-Sq. d.f*	*Prob.*
Uji Hausman (FEM vs REM)	*Cross-section random*	25,454972	6	0,0003

Sumber: Olah Data Eviews 10 (2021)

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

Hasil uji chow menunjukkan nilai *probability cross-section f* sebesar 0,0000 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil dari α (0,05), dari hasil tersebut maka dapat diputuskan bahwa model yang terpilih adalah *fixed effect model*. Sedangkan hasil dari uji hausman menunjukkan nilai *probability cross-section random* adalah sebesar 0,0003 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil dari α (0,05).

Dari uji spesifikasi model yang telah dilakukan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *fixed effect model* merupakan model terbaik dalam penelitian ini. Dari estimasi *fixed effect model* tersebut diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$LnPOV_{it} = 4{,}448964 - 0{,}003533TPT_{it} - 0{,}015198RK_{it} + 0{,}039000AGR_{it} + 0{,}019850IND_{it} - 0{,}005975PROD_{it} - 0{,}000140DD_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dari hasil persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa koefisien konstanta pada penelitian ini adalah sebesar 4,448964 dan signifikan, yang berarti bahwa jika semua variabel independen dalam penelitian ini dianggap konstan, maka rata-rata jumlah penduduk miskin adalah sebesar 4,448964, Selanjutnya nilai koefisien regresi variabel tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar -0,003533 namun tidak signifikan. Nilai koefisien regresi variabel *dependency ratio* diperoleh sebesar -0,015198 namun tidak signifikan. Pada variabel *agrishare* diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,039000 yang berarti bahwa setiap peningkatan agrishare sebesar satu persen, maka dapat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 0,039000 persen dengan asumsi variabel lain tetap *(ceteris paribus)*. Pada variabel *industrishare* diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,019850 yang berarti bahwa setiap peningkatan *industrishare* sebesar satu persen, maka dapat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 0,019850 persen dengan asumsi variabel lain tetap *(ceteris paribus)*. Selanjutnya nilai koefisien regresi sebesar -0,005975 Pada variabel produktivitas tenaga kerja berarti bahwa setiap peningkatan produktivitas tenaga kerja sebesar satu persen, maka dapat menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,005975 persen dengan asumsi variabel lain tetap *(ceteris paribus)*. Kemudian pada variabel dana desa diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,000140 yang berarti bahwa setiap peningkatan dana desa sebesar satu persen, maka dapat menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,000140 persen dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus)*.

Apabila dilihat dari pengaruh efek individual di setiap kabupaten terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, dapat dianalisis dengan melihat nilai *intercept* masing-masing cross-section dimana nilai *intercept* dihitung dari hasil penjumlahan antara konstanta model dengan konstanta masing-masing *cross section*. Tabel 4 menunjukkan spesifikasi pengaruh efek individual masing-masing kabupaten terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.

Tabel 4. Spesifikasi *Fixed Effect Model*

Kabupaten	**C**	**Konstanta *Cross-Section***	***Intercept***
Kab. Cilacap	4,448964	0,50866	4,957624
Kab. Banyumas	4,448964	1,174919	5,623883
Kab. Purbalingga	4,448964	0,060838	4,509802
Kab. Banjarnegara	4,448964	0,044048	4,493012
Kab. Kebumen	4,448964	0,724131	5,173095
Kab. Purworejo	4,448964	-0,16123	4,287730
Kab. Wonosobo	4,448964	-0,00028	4,448688
Kab. Magelang	4,448964	0,25074	4,699704
Kab. Boyolali	4,448964	-0,17261	4,276359

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

Kab. Klaten	4,448964	0,495699	4,944663
Kab. Sukoharjo	4,448964	-0,26619	4,182779
Kab. Wonogiri	4,448964	-0,24488	4,204083
Kab. Karanganyar	4,448964	-0,25652	4,192445
Kab. Sragen	4,448964	0,105268	4,554232
Kab. Grobogan	4,448964	0,220211	4,669175
Kab. Blora	4,448964	-0,01305	4,435915
Kab. Rembang	4,448964	-0,37017	4,078796
Kab. Pati	4,448964	-0,0653	4,383662
Kab. Kudus	4,448964	-1,10684	3,342122
Kab. Jepara	4,448964	-0,2006	4,248369
Kab. Demak	4,448964	-0,00591	4,443054
Kab. Semarang	4,448964	-0,25893	4,190034
Kab. Temanggung	4,448964	-0,60217	3,846799
Kab. Kendal	4,448964	-0,33976	4,109206
Kab. Batang	4,448964	-0,6452	3,803766
Kab. Pekalongan	4,448964	-0,14316	4,305805
Kab. Pemalang	4,448964	0,461563	4,910527
Kab. Tegal	4,448964	0,240301	4,689265
Kab. Brebes	4,448964	0,566396	5,015360

Sumber: Olah Data Eviews 10 (2021)

Berdasarkan tabel 4 di atas, terdapat variasi spesifikasi efek individual masing-masing kabupaten yang menunjukkan adanya pengaruh *cross section* di setiap kabupaten terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi berdasarkan hasil spesifikasi efek individual yaitu Kabupaten Banyumas dengan nilai *intercept* sebesar 5,623883 yang berarti bahwa Kabupaten Banyumas memiliki pengaruh paling besar terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada saat tidak ada variabel independen yang mempengaruhi. Sedangkan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terendah berdasarkan hasil spesifikasi efek individual yaitu Kabupaten Kudus dengan nilai *intercept* sebesar 3,342122 yang berarti bahwa Kabupaten Kudus memiliki pengaruh paling kecil terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada saat tidak ada variabel yang mempengaruhi.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan uji *jarque-bera* menghasilkan nilai *probability* J-B adalah sebesar 0,422933, artinya bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal. Uji multikolinieritas dengan melihat nilai koefisien korelasi antar variabel independen menghasilkan nilai korelasi lebih kecil dari 0,8 sehingga model dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji park menghasilkan nilai *probability* pada variabel independen sebagian besar bernilai lebih besar dari α (0,05) yang berarti bahwa sebagian besar variabel independen tidak memilki pengaruh signifikan terhadap residual. Dengan demikian tidak ada masalah heteroskedastisitas. Uji autokorelasi dengan menggunakan uji *breusch-godfrey serial correlation LM test* diperoleh nilai prob. F sebesar 0,8051 dan *prob.chi-square* sebesar 0,7972 sehingga disimpulkan tidak terdapat masalah autokorelasi. Dari keempat uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini telah memenuhi seluruh asumsi klasik.

Uji Statistik Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil tabel 2 di atas, diketahui bahwa nilai *R-squared* (R^2) pada model ini adalah sebesar 0,992355. Hal ini menunjukkan bahwa 99,23 persen variasi variabel dependen dalam

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021
EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

penelitian ini dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdapat dalam model ini, Sedangkan sisanya sebesar 0,77 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel 2 di atas, nilai *probability (F-statistic)* pada estimasi *fixed effect model* adalah sebesar 0,000000, nilai tersebut lebih kecil dari α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pengangguran terbuka, *dependency ratio*, *agrishare, industrishare*, produktivitas tenaga kerja, dan dana desa secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Uji Parsial (Uji T)

Uji T dilihat dari nilai probabilitas masing-masing variabel independen. Hasil regresi menunjukkan bahwa dari keenam variabel independen, pengangguran terbuka dan *dependency ratio* memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan *agrishare, industrishare,* produktivitas tenaga kerja, dan dana desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Pembahasan

Pengaruh Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin 29 kabupaten di Jawa Tengah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa naik turunnya tingkat pengangguran terbuka tidak berdampak pada tinggi rendahnya jumlah penduduk miskin. Apabila dilihat dari teori yang ada, menurut Sukirno (2014), pengangguran berdampak langsung pada berkurangnya pendapatan masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, teori tersebut nyatanya tidak relevan dengan penerapan di negara berkembang seperti Indonesia sehingga memiliki hubungan yang terbalik. Di indonesia tidak ada jaminan sosial bagi orang yang menganggur, sehingga banyak penduduk miskin yang memaksakan diri tetap bekerja untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Dengan kata lain bahwa tidak semua orang yang menganggur adalah miskin (Zuhdiyaty & Kaluge, 2018). Hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Lilik Andrietya et al. (2020) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pengangguran tidak berpengaruh karena masih adanya anggota keluarga yang tetap bekerja meski pendapatannya rendah dan miskin. Sedangkan Isa et al. (2019) juga menjelaskan bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Menurutnya pengangguran tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek. Namun ketika tingginya angka pengangguran tersebut diiringi dengan tingginya tingkat inflasi, maka dalam jangka panjang meningkatnya pengangguran dan inflasi juga akan meningkatkan angka kemiskinan.

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan yang mereka alami bukan disebabkan karena mereka menganggur, tapi memang pekerjaan yang mereka jalani tetap tidak mampu untuk membantu meningkatkan kondisi perekonomian mereka. Orang-orang yang bekerja tetapi masih berada dalam kategori miskin ini disebut dengan pekerja miskin *(working poor)*. Pekerja miskin ini adalah mereka yang berada di kondisi setengah menganggur atau pengangguran terselubung *(disguised unemployment)* yang bekerja dengan jam kerja sedikit. Penyebabnya adalah rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja, sehingga untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya mereka tetap

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021
EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

mengambil pekerjaan tersebut dengan pendapatan yang sedikit. Kondisi ini dapat dilihat dari data rata-rata tingkat setengah pengangguran di Jawa Tengah dalam jangka waktu enam tahun terakhir yang berkisar di angka 6,39 persen dimana angka pengangguran setengah tertinggi terjadi pada tahun 2020 hingga mencapai 8,60 persen. Hal ini memberikan indikasi bahwa produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah masih sangat rendah. Mereka tetap bekerja namun masih mencari pekerjaan lain yang lebih cocok dengan kemampuan dan keinginan mereka. Akibatnya pendapatan yang mereka terima rendah dan hal tersebut yang menyebabkan tingginya kemiskinan di Jawa Tengah.

Pengaruh *Dependency Ratio* Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Dari hasil regresi ditemukan bahwa *dependency ratio* tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin 29 kabupaten di Jawa Tengah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa naik turunnya *dependency ratio* tidak berdampak pada tinggi rendahnya jumlah penduduk miskin. Kondisi ini berbanding terbalik dengan teori yang menyatakan bahwa terdapat hubungan searah antara *dependency ratio* dengan kemiskinan. Tingginya *dependency ratio* yang tidak diimbangi dengan perluasan lapangan pekerjaan akan berdampak pada meningkatnya kemiskinan yang disebabkan tingginya beban tanggungan dari para pencari kerja untuk tetap menghidupi kebutuhan anggota keluarga yang tidak produktif (Arsyad, 2016). Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arif (2020) yang menyatakan bahwa *dependency ratio* dan kemiskinan tidak memiliki hubungan yang nyata. Penelitian lain yang dilakukan Hong & Sullivan (2013) juga menyatakan bahwa secara statistik *dependency ratio* tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Menurutnya tingginya jumlah kemiskinan cenderung dipengaruhi oleh faktor lain seperti pendidikan, status sosial, dan kondisi ekonomi keluarga tersebut.

Dalam kasus ini, untuk menganalisis lebih jauh alasan mengapa *dependency ratio* tidak berpengaruh terhadap kemiskinan adalah dengan melihat rincian kelompok umur non produktif mana yang mendominasi suatu wilayah tersebut. Apabila *dependency ratio* dibentuk oleh penduduk usia sekolah (usia muda) maka besarnya *dependency ratio* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Dalam hal ini, penduduk usia muda cenderung akan mendapatkan bantuan pendidikan sehingga besarnya konsumsi pendidikan pada rumah tangga miskin cenderung rendah. Di Jawa Tengah sendiri, penduduk non produktif didominasi oleh penduduk usia muda. Menurut BPS (2021) pada rentang tahun 2014-2020, persentase penduduk usia muda berkisar pada 22–25 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Jawa Tengah. Sedangkan persentase penduduk usia tua berkisar di angka 7–8 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Jawa Tengah. Artinya penduduk usia produktif cenderung memiliki beban tanggungan yang lebih besar terhadap penduduk usia non produktif muda. Dalam hal ini, pada usia sekolah, pemerintah memberikan beberapa bantuan pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan berupa beasiswa-beasiswa yang tersedia, maka dalam hal ini kepala keluarga tidak perlu lagi membiayai keperluan sekolah anak-anaknya. Sehingga pola negatif antara *dependency ratio* dengan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tereduksi dengan berkurangnya pengeluaran konsumsi pendidikan dalam rumah tangga.

Pengaruh *Agrishare* Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil regresi, menunjukkan bahwa *agrishare* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin 29 kabupaten di Jawa Tengah. Dilihat dari teorinya, beberapa versi menyatakan hubungan sektor pertanian dan kemiskinan

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021
EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

yang saling berlawanan. Jhingan (2004) menjelaskan bahwa sektor pertanian berperan langsung sebagai sumber pendapatan utama negara dan sebagai ketahanan pangan sehingga ketika sektor pertanian ini tumbuh dengan pesat maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dan kemiskinan akan berkurang. Sedangkan menurut Todaro, Michael P. (2006) menjelaskan bahwa pada umumnya penduduk miskin bertempat tinggal di pedesaan dan menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Semakin lama mereka bekerja di sektor pertanian maka akan semakin tinggi juga resiko mereka menjadi miskin. Apabila dilihat berdasarkan data, kemiskinan di pedesaan pada kurun waktu 7 tahun terakhir memang lebih tinggi dibandingkan kemiskinan di perkotaan. Sedangkan sebagian besar aktivitas pertanian masih terpusat di pedesaan. Tingginya produktivitas sektor pertanian di pedesaan tidak sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan petani (Salqaura, 2020).

Hasil penelitian ini menunjukkan kecenderungan arah yang positif antara output sektor pertanian dengan kemiskinan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi sektor pertanian di Jawa Tengah belum mampu menurunkan angka kemiskinan. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Satrio (2018) yang menyatakan bahwa tingginya kontribusi sektor pertanian berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penduduk miskin pada umumnya terpusat pada wilayah pedesaan dan rata-rata kepala rumah tangganya berprofesi sebagai petani. Sedangkan hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Abro et al. (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan output sektor pertanian memang berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, namun hal tersebut tidak menguntungkan bagi tenaga kerja miskin di sektor pertanian dikarenakan tenaga kerja miskin memiliki aset dan alat penunjang kegiatan pertanian yang lebih sedikit serta menghadapi kendala sosial ekonomi lainnya sehingga tingginya output pertanian tidak secara langsung akan meningkatkan pendapatan mereka.

Hubungan yang positif antara sektor pertanian dengan kemiskinan ini disebabkan karena pendapatan di sektor pertanian cenderung lebih sedikit dibanding sektor lain. Rendahnya pendapatan tersebut karena mayoritas pekerja di sektor pertanian hanya sebagai buruh tani dan tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan panjangnya rantai tengkulak di sektor pertanian yang membuat harga output pertanian dari tangan pertama menjadi lebih murah dan hal tersebut sangat merugikan para buruh tani. Dalam kasus ini, memang kehadiran tengkulak di desa menjadi pilihan satu-satunya bagi petani dalam menjual hasil panennya. Tidak adanya peran pemerintah dan peran lembaga yang mampu menampung hasil panen dari petani membuat mereka terpaksa harus menggantungkan hasil panen kepada satu pihak yaitu tengkulak. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa peran tengkulak dalam proses distribusi ke konsumen akhir adalah penting (Megasari, 2019). Sedangkan petani tidak memiliki akses sama sekali dan hanya menggantungkan penjualan produk pertanian mereka dari tengkulak. Akibatnya, ketidakmampuan petani dalam mengakses pasar ini membuat petani tidak memiliki pengetahuan tentang harga pasar dan menjual ke tengkulak dengan harga yang jauh dibawah harga pasar.

Pengaruh *Industrishare* Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Dari hasil regresi ditemukan bahwa *industrishare* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin 29 kabupaten di Jawa Tengah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan output dari sektor industri hanya akan menambah jumlah penduduk miskin. Di Jawa Tengah sendiri, sektor industrinya tergolong sudah cukup berkembang dengan banyaknya jumlah unit usaha/perusahaan yang ada. Namun yang

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021
EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

menjadi masalah adalah bahwa sebagian besar industri yang ada adalah industri kecil dan menengah. Berdasarkan data BPS, jumlah industri besar di Jawa Tengah pada tahun 2019 hanya sebesar 4.451 perusahaan saja, sedangkan perusahaan mikro dan kecil terdapat sebanyak 912.421 perusahaan. Artinya 95 persen industri di Jawa Tengah didominasi oleh industri mikro dan kecil. Dilihat dari teorinya, menurut Dumairy (1996) sektor industri merupakan sektor yang strategis karena sektor ini dapat menggerakkan kemajuan sektor-sektor lain. Teori tersebut memberikan penjelasan juga bahwa pengembangan industri yang menitikberatkan pada penciptaan lapangan kerja akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan. Hasil penelitian ini berlawanan dengan teori yang ada. Namun mengacu pada penelitian terkait, hasil Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Budhi, S., Kembar (2013) yang menjelaskan bahwa *share* industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Studi lain yang dilakukan Suryahadi et al. (2012) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan sektor industri menjadi sangat tidak relevan untuk pengentasan kemiskinan meskipun sektor ini menjadi sektor yang berkontribusi cukup besar terhadap PDB.

Dalam kondisi ini, perlu dilakukan analisis terkait dampak pertumbuhan sektor industri ini, apakah pertumbuhan tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat miskin. Untuk analisis tersebut, dapat dilihat dari dampak pertumbuhan sektor industri terhadap aspek ketenagakerjaan dan aspek *demand side*. Apabila dilihat berdasarkan aspek ketenagakerjaannya, apakah peningkatan output sektor industri tersebut memperhatikan penyerapan tenaga kerja miskin. Karena pertumbuhan sektor industri saja tidak cukup untuk pengentasan kemiskinan, perlu dilakukan analisis mendalam terkait dengan dampak pertumbuhannya terhadap penyerapan tenaga kerja (Mustapha et al., 2015). Dalam hal ini adanya standar kualifikasi yang tinggi pada sektor industri menyebabkan penduduk miskin sulit memasuki sektor tersebut, khususnya yang terkait dengan kualifikasi pendidikan dan keterampilan. Ketika *share* industri meningkat hanya akan menguntungkan pengusaha dan tenaga kerja dengan kualifikasi tinggi saja. Ukuran dari aspek ketenagakerjaan ini adalah penyerapan tenaga kerja penduduk miskin yang dihitung dari hasil bagi antara laju pertumbuhan penduduk setengah menganggur *(working poor)* dengan laju pertumbuhan PDRB sektor industri.

Kemudian dilihat dari aspek *demand side* apakah produk dari sektor industri mampu dijangkau oleh masyarakat miskin atau tidak. Masyarakat miskin pada umumnya memiliki daya beli yang rendah, ketika *share* industri meningkat hanya akan meningkatkan permintaan masyarakat kelompok menengah ke atas saja. Sehingga peningkatan output tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat miskin. Ukuran dari *demand side* ini adalah daya beli masyarakat yang di-*proxy* dari *income* per kapita. Menurut Primadi (2020), besaran *income* per kapita dapat menjadi rujukan dari pola konsumsi yang dilakukan. Kekuatan daya beli pasar domestik menjadi salah satu indikator pertumbuhan sektor industri yang berkualitas dan berkeadilan.

Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin 29 kabupaten di Jawa Tengah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa naik turunnya produktivitas berdampak pada tinggi rendahnya jumlah penduduk miskin. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa produktivitas tenaga kerja berperan besar dalam pengentasan masalah kemiskinan. Berdasarkan teori konsumsi Keynes, tingkat pendapatan masyarakat akan

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021
EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

menentukan besarnya konsumsi masyarakat. Ketika pendapatan meningkat akibat produktivitas kerjanya tinggi maka konsumsi masyarakat juga akan meningkat yang mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Teori lain juga dikemukakan oleh Nurkse tentang lingkaran setan kemiskinan *(vicious cycle of poverty)* yang menjelaskan bahwa kemiskinan dapat dijelaskan dari sisi pembentukan modal yang dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan masyarakat. Pendapatan rendah tersebut disebabkan karena tingkat produktivitas yang rendah sehingga kemampuan untuk berinvestasi dan menabung juga rendah.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Adriana (2020) yang menyatakan bahwa produktivitas tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Peranan kualitas tenaga kerja dalam proses produksi dan pembangunan nasional sangatlah penting. Kualitas tenaga kerja tersebut diukur dalam bentuk produktivitas. Ketika produktivitas tenaga kerja di suatu wilayah tinggi, maka pendapatan yang diterima masyarakat tersebut akan meningkat dan pendapatan negara pun meningkat sehingga kemiskinan dapat teratasi. Studi lain yang dilakukan Gupta Kanupriya (2020) juga menjelaskan bahwa produktivitas tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pengentasan kemiskinan di India. Secara khusus, kebijakan pengembangan keterampilan dan perluasan akses pendidikan tenaga kerja yang berdampak langsung pada peningkatan produktivitas memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Untuk melihat lebih jauh lagi bagaimana peningkatan produktivitas ini dapat menurunkan kemiskinan sesuai dengan hasil penelitian ini, mengacu pada teori Nurkse di atas, bahwa untuk memutus mata rantai lingkaran setan kemiskinan dapat dilakukan dengan peningkatan keterampilan sumber daya manusianya, penambahan modal investasi, dan pengembangan teknologi. Melalui berbagai suntikan program dari pemerintah maka diharapkan produktivitas akan meningkat dan kemiskinan akan berkurang. Selain itu, hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan aspek non ekonomi memang penting untuk dilaksanakan. Di Jawa Tengah sendiri, tingkat produktivitasnya termasuk rendah apabila dibandingkan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja di tingkat nasional yang berkisar di angka lebih dari 78 juta rupiah per tenaga kerja. Sedangkan di Jawa Tengah berkisar di 46–55 juta rupiah per tenaga kerja saja. Berdasar pada uraian sebelumnya bahwa tidak semua yang miskin adalah mereka yang menganggur, rendahnya produktivitas tersebut disebabkan karena sebagian besar tenaga kerja di Jawa Tengah berada di kondisi setengah menganggur atau pengangguran terselubung *(disguised unemployment)* yang bekerja dengan jam kerja sedikit dan produktivitas yang rendah. Mereka bekerja dengan terpaksa karena tuntutan ekonomi dan pendapatan yang rendah. Namun, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan ternyata tingkat produktivitas tenaga kerja di jawa tengah tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di 29 kabupaten. Dan dilihat dari perkembangannya, walaupun produktivitas 29 kabupaten di Jawa Tengah masih tergolong rendah namun pertumbuhannya mengalami tren yang positif, artinya terjadi peningkatan tiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa memang peningkatan produktivitas itu nyata dan berdampak pada penurunan kemiskinan. .

Pengaruh Dana Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa variabel dana desa memiliki pengaruh yang negatif dan signfikan terhadap jumlah penduduk miskin 29 kabupaten di Jawa Tengah. Hal

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

tersebut mengindikasikan bahwa besar kecilnya dana desa berdampak pada tinggi rendahnya jumlah penduduk miskin. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Hermawan et al. (2019) yang menjelaskan bahwa dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Dana desa mampu merangsang dan berkontribusi besar bagi pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, sehingga selain masyarakat mendapat bantuan secara tunai, masyarakat juga dapat menikmati pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Enami et al. (2019) yang menjelaskan tentang efektivitas bantuan tunai di Iran. Menurutnya, pemberian bantuan secara tunai yang ditujukan kepada masyarakat miskin di pedesaan jauh lebih efektif menurunkan kemiskinan dalam jangka pendek. Sedangkan dilihat dari teorinya, kesejahteraan masyarakat merupakan ukuran dari keberhasilan pembangunan masyarakat yang dilihat pada peningkatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan kesejahteraan masyarakat yang rendah terpusat pada wilayah desa (Todaro, Michael P., 2006). Dalam hal ini dana desa merupakan salah satu solusi strategis dalam pengentasan kemiskinan di tingkat desa yang ditawarkan oleh pemerintah. Dan mengacu dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian dana desa yang efektif seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari penurunan angka kemiskinan di wilayah pedesaan karena pedesaan hingga sekarang masih menjadi wilayah yang bersinggungan langsung dengan kemiskinan.

Lebih lanjut berkaitan dengan program dana desa ini, program tersebut pertama kali diluncurkan pada tahun 2014 sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Secara khusus dana desa ini diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Namun dilihat berdasarkan data, rasanya sulit untuk menjelaskan bahwa dana desa ini memang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan di Jawa Tengah. Data menunjukkan bahwa sebelum maupun sesudah diberlakukannya kebijakan dana desa ini, kemiskinan di Jawa Tengah cenderung memiliki pola penurunan yang sama yaitu menurun tapi tidak signifikan. Bahkan setelah adanya dana desa ini, justru penurunan kemiskinannya cenderung konstan. Sebuah realita yang mengejutkan bahwa nyatanya dana desa ini belum secara efektif menurunkan angka kemiskinan. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil koefisien regresi pada penelitian ini yang secara statistik menghasilkan nilai koefisien dana desa sebesar 0,000140 yang berarti bahwa setiap peningkatan dana desa sebesar satu persen, maka dapat menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,000140 persen. Angka yang sangat kecil untuk ukuran penurunan kemiskinan. Kondisi tersebut semakin diperparah lagi dengan permasalahan yang berkaitan dengan teknis penyaluran dana desa maupun permasalahan realisasinya. Selain itu, banyaknya kasus penyelewengan yang terjadi di lingkup pemerintah desa semakin memberikan isyarat bahwa memang kebijakan dana desa ini perlu dilakukan evaluasi secara mendalam.

Studi yang dilakukan Fiszbein et al. (2014) di beberapa negara di Benua Asia dan Amerika menunjukkan bahwa indikator untuk melihat keberhasilan program bantuan tunai adalah dilihat dari perubahan tingkat pendapatan masyarakat, perubahan konsumsi masyarakatnya, dan penurunan angka kesenjangannya. Dalam hal ini studi primer terkait telah dilakukan di Indonesia untuk melihat apakah pelaksanaan dana desa ini telah sesuai dengan tujuan diberlakukannya kebijakan ini yaitu untuk pembangunan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan Lalira et al. (2018) menemukan bahwa pemanfaatan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat masih tidak berjalan secara efektif, artinya bahwa pemanfaatan dana desa ini masih berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana fisik pedesaan dengan kualitas yang masih minim. Dalam hal ini pemerintah desa belum

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

memanfaatkan anggaran dana desa ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

SIMPULAN

Pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap kemiskinan karena permasalahan pengangguran di Jawa Tengah cukup kompleks dimana permasalahan tersebut tidak hanya berpusat pada pengangguran terbuka saja, masih banyak tenaga kerja yang secara ekonomi miskin namun tetap bekerja dengan pendapatan rendah karena terpaksa. Sehingga kedepannya perlu adanya pelatihan ketenagakerjaan yang berfokus pada peningkatan *skill* dan keterampilan secara efektif dan terarah dengan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat.

Dependency ratio juga tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian ini sebenarnya Jawa Tengah memiliki bibit usia produktif yang cukup banyak karena beban tanggungan yang terbentuk adalah berasal dari usia muda yang belum produktif. Hal tersebut dapat menjadi peluang yang besar bagi Jawa Tengah terkait peningkatan tenaga kerjanya di masa mendatang. Sehingga kedepannya pemerintah dan sektor terkait perlu melakukan persiapan yang matang dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan.

Agrishare berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini sejalan dengan data di lapangan yang menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang paling bersinggungan dengan kemiskinan. Dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah dan lembaga untuk menjamin kesejahteraan para petani melalui pendampingan terkait pemasaran produk pertanian sekaligus perlindungan bagi petani dari permasalahan panjangnya rantai tengkulak yang sangat merugikan petani.

Industrishare berpengaruh terhadap kemiskinan. Dilihat berdasarkan data memang tumbuhnya sektor industri ini tidak menguntungkan bagi masyarakat miskin. Perlu adanya evaluasi mendalam terkait bagaimana pertumbuhan ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja miskin. Selain itu, pemerintah dapat membantu pengembangan industri mikro dan kecil terkait penjualan dan *branding* agar pertumbuhan industri mikro dan kecil ini sejalan dengan tingginya penyerapan tenaga kerja.

Produktivitas tenaga kerja berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa *skill* dalam dunia kerja itu penting. Dalam hal ini strategi penanggulangan kemiskinan melalui indikator ini adalah dengan meningkatan kebutuhan dasar masyarakat miskin dalam hal perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, peningkatan kualitas teknologi, perluasan relasi kerja *(networking)* bagi masyarakat miskin, serta informasi pasar.

Dana desa berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini menandakan bahwa kebijakan ini perlu adanya peningkatan kualitas lagi terkait implementasinya karena pelaksanaan dana desa selama ini belum efektif dalam hal realisasi programnya. Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pengalokasiannya, karena realisasinya ini harus berfokus pada kemudahan akses masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan pokok seperti kesehatan dan pendidikan. Dana desa ini juga seharusnya dapat berdampak pada peningkatan kualitas penduduknya melalui program yang berkaitan dengan pemberdayaan.

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

DAFTAR PUSTAKA

Abro, Z. A., Alemu, B. A., & Hanjra, M. A. (2014). Policies For Agricultural Productivity Growth and Poverty Reduction in Rural Ethiopia. *World Development*, *59*, 461–474. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.033

Adediyan, A. R., & Omorenuwa, L. O. (2021). Sectoral Analysis of Human Capital Investment , Labor Productivity and Poverty in Nigeria. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics And Business*, *5*(June 2020), 131–146.

Adriana, T. (2020). Pengaruh Tingkat Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Produktivitas Terhadap Kemiskinan di Kalimantan. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, *8(2)*.

Annur, R. A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal*, *2*(4), 409–426. https://doi.org/10.15294/edaj.v2i4.3209

Arham, M. A., & Hatu, R. (2020). Does Village Fund Transfer Address the Issue of Inequality and Poverty? A Lesson from Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, *7*(10), 433–442. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.433

Arif, M. (2020). Rasio-Rasio Rasio Pembentuk Angka Kemiskinan di Kabupaten Sragen. *The 11th University Research Colloquium 2020; Universitas Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*, 315–323.

Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan. Edisi Kelima*. STIE YKPN.

Badan Pusat Statistik. (2018). *Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2012-2016*. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

_____. (2021). *Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2016-2020*. Semarang: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

_____. (2021). *Jawa Tengah Dalam Angka Berbagai Tahun Terbitan*. Semarang: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

_____. (2021). *Profil Ketenagakerjaan Jawa Tengah Berbagai Tahun Terbitan*. Semarang: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

_____. (2021). *Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Berbagai Tahun Terbitan*. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

Budhi, S., Kembar, M. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, *6(1)*, 1–6.

DJPK Kemenkeu. (2020). *Rincian Alokasi Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN Berbagai Tahun Terbitan*.

Dorosh, P., & Thurlow, J. (2018). Beyond Agriculture Versus Non-Agriculture: Decomposing Sectoral Growth–Poverty Linkages in Five African Countries. *World Development*, *109*, 440–451. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.08.014

Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga.

Enami, A., Lustig, N., & Taqdiri, A. (2019). Fiscal Policy, Inequality, and Poverty in Iran: Assessing The Impact and Effectiveness of Taxes and Transfers. *Middle East Development Journal*, *11*(1), 49–74. https://doi.org/10.1080/17938120.2019.1583510

Fiszbein, A., Kanbur, R., & Yemtsov, R. (2014). Social Protection and Poverty Reduction: Global patterns and Some Targets. *World Development*, *61*, 167–177. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.04.010

Ghozali, I. (2013). *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika : Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

Gilarso. (2007). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Edisi Pertama*. IKAPI.

Gujarati, D. (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat.

Gupta Kanupriya, G. A. Sen. (2020). Enhancing Productivity for Poverty Reduction in India. *Adb Briefs*, *4*(100), 1–8.

Herman, E. (2014). Working Poverty in The European Union and It's main Determinants: An Empirical Analysis. *Engineering Economics*, *25*(4), 427–436. https://doi.org/10.5755/j01.ee.25.4.6339

Hermawan, A., Istoqomah, & Ahmad, A. A. (2019). The Effect of Village Funds on Rural Poverty: Empirical Evidence From Java Island. *International Conference on Rural Development and Enterpreneurship*, *5*(1), 177–183.

Hong, H., & Sullivan, F. R. (2013). Determinants of Poverty Status in Taiwan: A Multilevel Approach. *Educational Technology Research and Development, 57*(5), 613–627. https://doi.org/10.1007/sl

Idris, A. (2016). *Ekonomi Publik*. Deepublish.

Isa, D. P., Arham, M. A., & Dai, S. I. (2019). Effects of Capital Expenditures, Development Index and Unemployment on Poverty in Gorontalo Province. *Jambura Equilibrium Journal*, *1*(1). https://doi.org/10.37479/jej.v1i1.1998

Ivanic, M., & Martin, W. (2018). Sectoral Productivity Growth and Poverty Reduction: National and Global Impacts. *World Development*, *109*, 429–439. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.07.004

Jhingan, M. (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada.

Kurniawan, D. (2009). *Kemiskinan di Indonesia dan Penanggulangannya*. 1–18.

Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2018). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *18*(4), 62–72.

Lilik Andrietya, A., Pujiati, A., & Setyadharma, A. (2020). Determinants of Poverty in Central Java Province 2013-2018. *Journal of Economic Education*, *9*(1), 81–88. https://doi.org/10.15294/jeec.v9i1.38671

Maku, O. E. (2019). *Unemployment, Poverty and Economic Growth in Nigeria*. *35*(1). https://doi.org/10.22367/jem.2019.35.01

Mankiw, G. (2012). *Macroeconomics*. Worth Publishers.

Megasari, L. A. (2019). *Ketergantungan Petani terhadap Tengkulak sebagai Patron dalam Kegiatan Proses Produksi Pertanian (Studi di Desa Baye Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)*. Universitas Airlangga.

Mubyarto. (2004). *Teori Ekonomi dan Kemiskinan*. Aditya Media.

Mustapha, A. B., Said, R., & Sidique, S. F. (2015). Urban Poverty, Inequality and Industry in Nigeria. *International Journal of Development Issues*, *14*(3), 249–263. https://doi.org/10.1108/IJDI-06-2015-0040

Prasetyoningrum, A. K. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, *6*(2), 217. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663

Primadi, Y. A. (2020). Analisis Dampak Industrialisasi Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, *8(1)*.

Putra, I. K. A. A., & Arka, S. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali. *EP Unud*, *7*(3), 416–444.

DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.7985

Published, Volume 21 No. 2, Desember 2021

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

ISSN : 1693-7600 (Print), ISSN : 2598-0157 (Online), *http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan*

Sakti, D. C. (2015). Pengaruh Output Sektor Pertanian, Industri Pengolahan Dan Perdagangan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Propinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *2*, 113–124. http://repository.unair.ac.id/39354/

Salqaura, S. S. (2020). Correlation Analysis of Agriculture Sector and Poverty. *Jurnal Agristan*, *2 (1)*.

Satrio, I. (2018). Sektor Pertanian: Faktor Utama Penentu Kemiskinan Jawa Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, *7*(2), 176–187. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5o7uH5JrgAhUiSY8KHTnYAyoQFjAAegQIAhAB&url=http://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika/article/view/1758&usg=AOvVaw32xzWSKyPFs0NfbjZJfqFv

Sinnathurai, V. (2013). An Empirical Study on the Nexus of Poverty, GDP Growth, Dependency Ratio and Employment in Developing Countries. *Journal of Competitiveness*, *5*(2), 67–82. https://doi.org/10.7441/joc.2013.02.05

Siregar, H., & Wahyuni, D. (2007). Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. *Economics Development*, *pertumbuhan ekonomi dan penduduk miskin*. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/PROS_2008_MAK3

Sukirno, S. (2014). *Pengantar Teori Makroekonomi*. PT Raja Grafindo Persada.

Suryahadi, A., Hadiwidjaja, G., & Sumarto, S. (2012). Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia Before and After the Asian financial crisis. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *48*(2), 209–227. https://doi.org/10.1080/00074918.2012.694155

Todaro, Michael P., S. C. S. (2006). *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan Jilid Satu*. Erlangga.

Tulus H. Tambunan. (2011). *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Zheng, J., Jiang, P., Qiao, W., Zhu, Y., & Kennedy, E. (2016). Analysis of Air Pollution Reduction and Climate Change Mitigation in the Industry Sector of Yangtze River Delta in China. *Journal of Cleaner Production*, *114*(2016), 314–322. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.07.011

Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2018). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, *11*(2), 27–31. https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.42